

**IMPLIKASI HUKUM PENGATURAN STATUS PEKERJA
PKWT TERHADAP PEMENUHAN HAK PEKERJA
BERDASARKAN PRINSIP KEPASTIAN HUKUM**

TESIS

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Guna mencapai gelar Magister Hukum**



OLEH :

ARTIKA SOPHIA MAHARANI
NIM. 1322400037

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2026**

**IMPLIKASI HUKUM PENGATURAN STATUS PEKERJA
PKWT TERHADAP PEMENUHAN HAK PEKERJA
BERDASARKAN PRINSIP KEPASTIAN HUKUM**

TESIS



**OLEH:
ARTIKA SOPHIA MAHARANI
NIM. 1322400037**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2026

**IMPLIKASI HUKUM PENGATURAN STATUS PEKERJA
PKWT TERHADAP PEMENUHAN HAK PEKERJA
BERDASARKAN PRINSIP KEPASTIAN HUKUM**

TESIS



OLEH:

ARTIKA SOPHIA MAHARANI

NIM. 1322400037

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2026

IMPLIKASI HUKUM PENGATURAN STATUS PEKERJA PKWT TERHADAP PEMENUHAN HAK PEKERJA BERDASARKAN PRINSIP KEPASTIAN HUKUM

Oleh:

ARTIKA SOPHIA MAHARANI

NIM. 1322400037

Telah disetujui Pembimbing:
Surabaya, Juli 2026

Dr. Wiwik Afifah, S.Psi., S.H., M.H



THESIS

**IMPLIKASI HUKUM PENGATURAN STATUS PEKERJA PKWT
TERHADAP PEMENUHAN HAK PEKERJA BERDASARKAN
PRINSIP KEPASTIAN HUKUM**

Oleh:

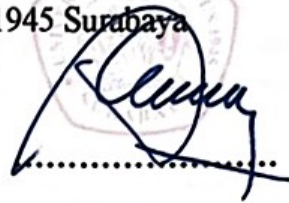
ARTIKA SOPHIA MAHARANI

NIM. 1322400037

Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan
Dinyatakan Lulus pada Ujian Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal, Juli 2026

Prof. Dr Slamet Suhartono, S.H., M.H.

Ketua



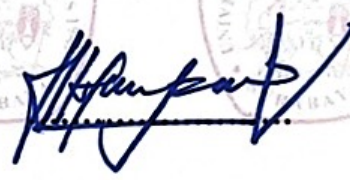
Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H.

Anggota I



Dr. Wiwik Afifah, S.H., M.H.

Anggota II



Mengesahkan,
Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,



Dr. Yovita Arie Mangestie, S.H., M.H.

NPP. 20310190808

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Artika Sophia Maharani

NIM : 1322400037

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Tesis yang saya tulis dengan Judul

**IMPLIKASI HUKUM PENGATURAN STATUS PEKERJA PKWT
TERHADAP PEMENUHAN HAK PEKERJA BERDASARKAN PRINSIP
KEPASTIAN HUKUM**

Merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Apabila di kemudian hari di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia Tesis ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dapat dibatalkan, serta di proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, Juli 2026

Hormat saya,





UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN

Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Artika Sophia Maharani
NBI/ NPM : 1322400037
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister ilmu Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul:

**IMPLIKASI HUKUM PENGATURAN STATUS PEKERJA PKWT
TERHADAP PEMENUHAN HAK PEKERJA BERDASARKAN PRINSIP
KEPASTIAN HUKUM**

Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Nonexclusive Royalty - Free Right*), Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : Surabaya
Pada tanggal : Juli 2026

Yang Menyatakan,



(Artika Sophia Maharani)

**Coret yang tidak perlu*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“IMPLIKASI HUKUM PENGATURAN STATUS PEKERJA PKWT TERHADAP PEMENUHAN HAK PEKERJA BERDASARKAN PRINSIP KEPASTIAN HUKUM”** tepat waktu. Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Pada penyelesaian studi dan penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu, izinkan penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. Hardjo Seputro, S.T., M.T., selaku Penjabat Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
2. Dr. Yovita Arie Mangestie, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
4. Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
5. Dr. Wiwik Afifah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran dalam memberikan arahan, bimbingan, serta masukan kepada penulis sejak penyusunan skripsi hingga penyelesaian tesis ini;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman berharga selama penulis menempuh pendidikan;
7. Alm. Papa tercinta, semasa hidupnya selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan, serta keyakinan kepada penulis untuk terus melangkah maju dalam menempuh pendidikan. Tesis ini merupakan salah satu bentuk pemenuhan janji penulis kepada beliau untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang magister. Meskipun beliau tidak lagi hadir secara fisik, doa, nilai-nilai kehidupan, dan semangat yang beliau tanamkan senantiasa menjadi kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan perjalanan akademik ini;
8. Mama tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa yang tiada henti, dukungan, semangat, serta pengorbanan yang tulus sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan ini dan terus berjuang meraih cita-cita;
9. Calon suami penulis, Fazar Ramadana, yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, serta menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini dan meraih setiap impian;

10. Bapak dan Ibu calon mertua yang telah memberikan doa, perhatian, serta dukungan kepada penulis selama proses penyusunan tesis ini;
11. Kakak-kakak dan adik penulis, yaitu Mbak Nova, Mas Iyus, Alm. Mas Gama, Mbak Weny, Mbak Widya, Mas Puguh, dan Adek Farhad, yang selalu memberikan doa, semangat, perhatian, serta dukungan kepada penulis;
12. Om Edi selaku wali penulis yang senantiasa memberikan motivasi, dukungan, dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan;
13. Teman-teman Magister Ilmu Hukum Angkatan 53 yang telah menjadi rekan seperjuangan, saling memberikan dukungan, berbagi pengalaman, serta menemani penulis dalam suka maupun duka selama menempuh studi;
14. Teman-teman Perpustakaan dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis; dan
15. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, doa, dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Harapan penulis, karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca khususnya pihak-pihak yang terlibat mengenai tema Ketenagakerjaan ini.

Surabaya, 12 Juli 2026

Penulis,

Artika Sophia Maharani

ABSTRAK

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) merupakan salah satu bentuk hubungan kerja yang bertujuan memberikan fleksibilitas dalam sistem ketenagakerjaan. Namun, pengaturan PKWT dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 masih menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum terhadap status pekerja serta pemenuhan hak-hak pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian sistem ketenagakerjaan bagi pekerja PKWT dengan prinsip kepastian hukum dan menganalisis implikasi hukum pengaturan status pekerja PKWT terhadap pemenuhan hak pekerja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara normatif menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan PKWT belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum karena belum terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur perubahan status pekerja PKWT menjadi PKWTT setelah hubungan kerja berlangsung secara terus-menerus. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian status hubungan kerja serta mengurangi perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan pengaturan PKWT melalui perumusan norma yang lebih jelas mengenai kepastian status pekerja agar tercipta kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keseimbangan hak serta kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja sesuai dengan prinsip negara hukum.

Kata Kunci: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Kepastian Hukum, Status Pekerja, Perlindungan Hukum, Hak Pekerja.

ABSTRACT

The Fixed-Term Employment Agreement (PKWT) is a form of employment relationship designed to provide flexibility within the labor system. However, the regulations governing PKWT specifically under Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation and Government Regulation Number 35 of 2021 continue to raise issues regarding legal certainty concerning worker status and the fulfillment of workers' rights. This study aims to analyze the alignment of the employment system for PKWT workers with the principle of legal certainty and to examine the legal implications of PKWT status regulations on the fulfillment of workers' rights. This is a normative legal study employing both statutory and conceptual approaches. The legal materials utilized—comprising primary, secondary, and tertiary sources—were analyzed normatively using a deductive method. The findings indicate that PKWT regulations do not yet fully provide legal certainty, as there are no provisions explicitly governing the conversion of a PKWT worker's status to that of an indefinite-term worker (PKWTT) following a continuous employment relationship. This situation potentially creates uncertainty regarding the status of the employment relationship and diminishes the protection of workers' rights. Therefore, it is necessary to refine PKWT regulations by formulating clearer norms regarding worker status to ensure legal certainty, legal protection, and a balance of rights and obligations between workers and employers, in accordance with the principles of a state based on the rule of law. Keywords: Fixed-Term Employment Agreement (PKWT), Legal Certainty, Worker Status, Legal Protection, Workers' Rights.

DAFTAR ISI

COVER DALAM	ii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Orisinalitas Penulisan	6
1.5.1 Hasil Penelitian Terdahulu	6
1.5.2 Kajian Penelitian Terdahulu	12
1.6 Metode Penelitian	13
1.6.1 Jenis Penelitian.....	13
1.6.2 Pendekatan Masalah	14
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	14
1.6.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	15
1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	15
1.7 Sistematika Pertanggungjawaban Penulisan	16
BAB II TEORI DAN KONSEP.....	17
2.1 Teori Kepastian Hukum	17
2.2 Teori Perlindungan Hukum	19
2.3 Teori Hak Asasi Manusia	20
2.4 Konsep Perjanjian Kerja	21
2.5 Konsep Pekerja	22
2.6 Konsep Pemberi Kerja	24
2.7 Konsep Equality Before The Law	24

BAB III PEMBAHASAN	29
3.1 Sistem Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Waktu Tertentu Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum	29
3.1.1 Unsur-Unsur Hubungan Kerja.....	33
3.1.2 Konsep Kerja PKWT.....	36
3.1.3 Perbedaan PKWT dengan Jenis Status Pekerja Lainnya	42
3.1.3.1 Pekerja Kontrak (PKWT).....	43
3.1.3.2 Pekerja Tetap (PKWTT)	45
3.1.3.3 Pekerja Ahli Daya (Outsourcing).....	46
3.1.4 Kepastian Hukum Status Pekerja PKWT	48
3.2 Implikasi Hukum Peraturan Status Pekerja bagi Pekerja Waktu Tertentu Terhadap Pemenuhan Hak Pekerja Ditinjau Dari Prinsip Kepastian Hukum	51
BAB IV PENUTUP	65
4.1 Kesimpulan	65
4.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67